



MEMBANGUN PENDIDIKAN HUMANIS YANG INKLUSIF TERHADAP PEREMPUAN: PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Marlon Garcia Jusufveto¹, Nur Khasanah²

^{1, 2} Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

¹ vetomarlon@gmail.com, ² nur.khasanah@uinqusdur.ac.id

Received	Revised	Accepted
11 June 2025	11 July 2025	20 August 2025
https://doi.org/10.67528/ic.v4i2.66		

Abstrak

Pendidikan humanis merupakan pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan kebebasan berpikir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendidikan humanis dapat dibangun tanpa merendahkan derajat perempuan dalam perspektif sosiologi pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk teori sosiologi klasik dan kontemporer seperti Durkheim, Freire, Marx, dan perspektif feminisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam dunia pendidikan masih dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal yang mereproduksi bias dan diskriminasi terhadap perempuan. Pendidikan humanis berkeadilan gender dapat diwujudkan melalui reformasi kurikulum yang inklusif, pelatihan guru berbasis kesadaran gender, serta penciptaan lingkungan sekolah yang partisipatif dan bebas kekerasan. Selain itu, pendidikan humanis menuntut kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana pencerdasan, tetapi juga wahana pembebasan sosial yang memuliakan martabat perempuan dan memperkuat keadilan sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Humanis, Kesetaraan Gender, Perempuan, Sosiologi Pendidikan, Keadilan Sosial

Abstract

Humanist education is an approach that places humans as the central subject of the learning process, emphasizing human values, equality, and intellectual freedom. This study aims to analyze how humanist education can be developed without diminishing the dignity of women from a sociological perspective. The research employs a qualitative approach using library research methods that review various scientific sources, including classical and contemporary sociological theories such as those of Durkheim, Freire, Marx, and feminist perspectives. The findings indicate that gender inequality in education remains influenced by patriarchal social structures that reproduce bias and discrimination against women. A gender-just humanist education can be realized through inclusive curriculum reform, gender-awareness teacher training, and the creation of participatory, non-violent learning environments. Furthermore, humanist education requires collaboration among governments, educators, and communities to internalize values of equality and humanity. Thus, education becomes not only a means of intellectual development but also a vehicle for social liberation that upholds women's dignity and promotes social justice within society.

Keywords: Humanist Education, Gender Equality, Women, Sociology of Education, Social Justice

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam membangun peradaban manusia yang berkeadilan, beradab, dan berkesetaraan. Dalam konteks sosiologi pendidikan, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang membentuk nilai, perilaku, dan struktur kesadaran masyarakat. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan atau pendidikan humanis menempatkan manusia sebagai subjek aktif dalam proses belajar, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun jenis kelamin (Munawarah, 2019).

Namun demikian, di berbagai lapisan masyarakat, masih terdapat praktik pendidikan yang bias gender dan berpotensi merendahkan derajat perempuan. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan akses, partisipasi, serta representasi perempuan dalam berbagai jenjang pendidikan. Dalam struktur sosial yang patriarkal, perempuan seringkali ditempatkan sebagai warga kelas dua yang memiliki ruang terbatas untuk mengembangkan potensi intelektualnya (Wani et al., 2024); (Fitriani & Neviyarni, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang tidak sensitif terhadap keadilan gender justru berpotensi melestarikan ketidakadilan sosial yang diwariskan oleh konstruksi budaya dan agama yang bias terhadap perempuan (Fitriani & Neviyarni, 2022). Contohnya, dalam beberapa daerah pedesaan di Indonesia, anak perempuan masih sering diprioritaskan untuk membantu pekerjaan domestik dibanding melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah perempuan usia 16–18 tahun di wilayah pedesaan hanya mencapai 69,4%, lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 75,8%. Selain itu, di lingkungan perguruan tinggi, fenomena diskriminasi gender juga tampak dari rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan akademik dan terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan profesional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam mengakses serta mengembangkan potensi akademiknya secara setara.

Konsep gender, menurut (Fakih, 2008) bukanlah perbedaan biologis, tetapi konstruksi sosial yang dibentuk oleh nilai dan norma masyarakat. Perbedaan gender akan menjadi masalah ketika melahirkan ketidakadilan, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda terhadap perempuan (Fitriani & Neviyarni, 2022). Dalam konteks pendidikan, bias gender sering muncul melalui kurikulum yang tidak sensitif gender, metode pengajaran yang mengutamakan nilai-nilai maskulinitas, serta representasi simbolik yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap, bukan pelaku utama (Roziqin et al., 2019).

Perspektif sosiologi menyoroti bahwa pendidikan tidak pernah netral dari struktur sosial. Menurut teori konflik, sistem pendidikan sering kali menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial dan gender (Marx dalam Iqbal et al., 2023). Patriarki yang tertanam dalam struktur sosial telah menciptakan "*false consciousness*" atau kesadaran palsu di mana perempuan menerima posisi subordinat sebagai hal yang wajar. Akibatnya, dominasi laki-



laki dalam dunia pendidikan tidak hanya terlihat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, tetapi juga dalam simbol dan narasi yang diajarkan di kelas (Sakina & A., 2017) ; (Nur et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan telah berlangsung sejak masa R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Namun, hingga kini, masih banyak daerah dan lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip keadilan gender (Solihin et al., 2022). Kesenjangan gender dalam pendidikan bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan (Amalia, 2017).

Fenomena bias gender dalam pendidikan Indonesia masih menjadi isu aktual hingga tahun 2024. Berdasarkan laporan *UNESCO Global Education Monitoring Report* (2023), kesenjangan partisipasi perempuan di tingkat pendidikan tinggi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih mencapai 12–15% dibandingkan laki-laki. Di sisi lain, kasus pelecehan dan kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus juga meningkat, seperti yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan (2024) bahwa lebih dari 58% kasus kekerasan di institusi pendidikan tidak tertangani secara tuntas. Selain itu, representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan pendidikan seperti rektor, dekan, atau kepala sekolah masih di bawah 20% secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa wacana kesetaraan gender dalam pendidikan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem dan budaya akademik.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pendidikan humanis yang berpihak pada keadilan gender menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna memberikan perspektif baru dalam membangun paradigma pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, membangun pendidikan humanis tanpa merendahkan derajat perempuan menjadi agenda penting dalam reformasi sosial dan pendidikan nasional. Pendidikan humanis dalam perspektif sosiologi menuntut adanya kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang menindas, serta penegakan nilai-nilai egalitarian dalam interaksi antara pendidik dan peserta didik (Roziqin et al., 2019). Pendidikan harus menjadi ruang pembebasan bukan penindasan yang menumbuhkan kesadaran, keadilan, dan kemanusiaan bagi semua gender.

Dengan mengintegrasikan perspektif humanisme dan sosiologi, diharapkan sistem pendidikan dapat melahirkan ruang belajar yang inklusif dan setara. Pendidikan bukan hanya sarana untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk memanusiakan manusia termasuk perempuan sebagai subjek sosial yang memiliki hak dan potensi yang sama dalam membangun peradaban (Munawarah, 2019); (Fitriani & Neviyarni, 2022). Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan dapat mengimplementasikan nilai-nilai humanisme tanpa mengabaikan kesetaraan gender. Untuk memperjelas arah kajian, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsep pendidikan humanis dipahami dalam konteks sosiologi pendidikan?



2. Bagaimana bentuk-bentuk ketimpangan gender yang masih terjadi dalam sistem pendidikan Indonesia?
3. Bagaimana pendidikan humanis dapat menjadi solusi dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami fenomena ketimpangan gender dalam konteks pendidikan Islam secara mendalam. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya-karya ilmiah, dokumen pendidikan, serta pemikiran tokoh-tokoh feminisme Islam dan sosiologis yang relevan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan analisis literatur secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian mampu menggambarkan realitas sosial dan nilai-nilai humanisme yang terkandung dalam sistem pendidikan Islam secara komprehensif dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Humanis dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Pendidikan humanis berakar pada pandangan filosofis bahwa manusia adalah makhluk rasional, moral, dan sosial yang memiliki potensi untuk berkembang melalui proses belajar. Dalam konteks sosiologi pendidikan, pendidikan tidak sekadar dimaknai sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang membentuk kesadaran, perilaku, dan nilai-nilai kolektif masyarakat. Dengan demikian, pendidikan humanis menempatkan manusia bukan sebagai objek pendidikan, melainkan sebagai subjek yang memiliki otonomi dalam menentukan arah hidupnya (Munawarah, 2019).

Menurut Emile Durkheim, pendidikan adalah sarana untuk menanamkan nilai-nilai sosial agar tercipta keteraturan sosial (*social order*). Ia berpendapat bahwa melalui pendidikan, generasi muda belajar mengenal moralitas sosial dan menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat (Roziqin et al., 2019). Akan tetapi, pandangan fungsional ini sering kali menempatkan pendidikan sebagai alat stabilitas, bukan transformasi. Di sinilah pendidikan humanis menawarkan koreksi penting: bahwa pendidikan tidak boleh hanya mencetak individu yang patuh terhadap sistem, tetapi juga manusia yang kritis terhadap ketidakadilan struktural.

Paulo Freire (1985) memperkenalkan konsep *pendidikan pembebasan*, yakni pendidikan yang menolak pendekatan “gaya bank” (*banking education*) di mana siswa dianggap sebagai wadah kosong untuk diisi oleh guru. Menurutnya, model tersebut menindas kemanusiaan peserta didik karena menghapus kemampuan berpikir kritis. Sebaliknya, pendidikan harus bersifat *dialogis* sebuah proses timbal balik antara guru dan siswa untuk menemukan kebenaran bersama melalui refleksi sosial. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran kritis (*conscientização*), yang memungkinkan individu memahami realitas sosial dan berani melawannya bila bersifat menindas.

Dalam konteks Indonesia, konsep humanisme pendidikan sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara tentang “*pendidikan yang memerdekakan*”. Dewantara menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah memerdekakan manusia lahir dan batin, bukan menjadikannya patuh semata kepada kekuasaan. Ia menekankan bahwa pendidikan harus berjalan dengan “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya” (Munawarah, 2019). Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan yang humanis bersifat kontekstual, menghormati keunikan peserta didik, serta menumbuhkan kepekaan sosial dan kemanusiaan.

Dalam sosiologi pendidikan, pendidikan humanis dipandang sebagai proses sosial yang saling berkaitan antara individu dan struktur sosial. Pendidikan membentuk manusia agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat, sementara masyarakat juga membentuk karakter dan nilai-nilai pendidikan itu sendiri (Fitriani & Neviyarni, 2022). Oleh sebab itu, pendidikan humanis tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Bila struktur sosial sarat ketimpangan, maka pendidikan harus berperan sebagai agen transformasi, bukan reproduksi ketidakadilan.

Dengan demikian, pendidikan humanis dalam perspektif sosiologi dapat diartikan sebagai pendidikan yang menempatkan martabat manusia di atas logika ekonomi atau kekuasaan. Tujuan akhirnya adalah membangun masyarakat yang lebih adil, egaliter, dan berkeadaban. Pendidikan yang memanusiakan manusia akan menciptakan ruang bagi kebebasan berpikir dan kesetaraan gender, yang menjadi dasar pembentukan tatanan sosial yang inklusif.

2. Ketimpangan Gender dalam Dunia Pendidikan

Walaupun ideal pendidikan humanis menekankan kesetaraan, realitas sosial menunjukkan bahwa dunia pendidikan masih diwarnai oleh ketimpangan gender. Ketimpangan ini tidak hanya terkait akses terhadap pendidikan, tetapi juga mencakup representasi, partisipasi, serta pengalaman perempuan dalam proses pembelajaran.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi di Indonesia memang meningkat, namun masih tertinggal dibanding laki-laki di sejumlah provinsi. Perempuan di pedesaan lebih sering menghadapi hambatan



struktural seperti kemiskinan, beban kerja domestik, dan nilai budaya yang membatasi peran mereka dalam pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan bukan sekadar persoalan akses, tetapi juga akibat dari struktur sosial yang patriarkal.

Dalam pandangan sosiolog feminis, ketimpangan gender dalam pendidikan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang membedakan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan. (Fakih, 2008) menegaskan bahwa perbedaan gender bukanlah bawaan biologis, melainkan hasil pembelajaran sosial yang diwariskan antar generasi. Masyarakat patriarkal menciptakan norma-norma yang menempatkan perempuan pada ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik. Akibatnya, pendidikan sering kali memperkuat pandangan bahwa perempuan lebih cocok menjadi ibu rumah tangga, sementara laki-laki diarahkan untuk menjadi pemimpin dan pencari nafkah.

Kesenjangan gender juga tampak pada isi kurikulum dan interaksi di ruang kelas. (Roziqin et al., 2019) menemukan bahwa dalam banyak buku teks di sekolah dasar dan menengah, representasi laki-laki sebagai tokoh utama dan perempuan sebagai pendukung masih dominan. Misalnya, laki-laki digambarkan sebagai ilmuwan, pemimpin, atau pekerja, sedangkan perempuan sering kali ditampilkan sebagai ibu rumah tangga. Representasi semacam ini memperkuat stereotip gender dan secara tidak langsung memengaruhi persepsi siswa terhadap peran sosial mereka.

Selain itu, dalam konteks pendidikan keagamaan, bias gender sering kali muncul melalui interpretasi nilai-nilai moral yang menempatkan perempuan sebagai “pelengkap” laki-laki. (Solihin et al., 2022) dalam penelitiannya di sekolah berbasis Islam menunjukkan bahwa pandangan tradisional terhadap peran perempuan masih kuat, meskipun lembaga tersebut secara formal mendukung prinsip kesetaraan. Guru dan peserta didik masih sering memandang kepemimpinan dan kecerdasan sebagai atribut laki-laki, sementara perempuan diidentikkan dengan kelembutan dan kepatuhan.

Dalam perspektif Marxian, ketimpangan gender dalam pendidikan juga dapat dipahami sebagai bagian dari reproduksi ideologi dominan. Karl Marx melihat pendidikan sebagai alat ideologis yang digunakan kelas berkuasa untuk mempertahankan sistem kapitalistik (Iqbal et al., 2023). Dalam konteks gender, sistem patriarki berfungsi seperti ideologi kelas, ia menciptakan *false consciousness* atau kesadaran palsu yang membuat perempuan menerima posisi subordinat sebagai sesuatu yang wajar. Pendidikan yang tidak kritis justru memperkuat kesadaran palsu ini dengan mengajarkan nilai-nilai yang seolah “alami” padahal hasil konstruksi sosial.

Namun, terdapat pula kemajuan signifikan. Gerakan feminisme pendidikan mendorong munculnya kebijakan afirmatif seperti pemberian beasiswa bagi perempuan, kuota kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan, dan integrasi pendidikan gender ke dalam kurikulum nasional. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memperbaiki struktur sosial yang timpang. Meski begitu, perubahan paradigma tetap

menjadi kunci utama, sebab tanpa kesadaran kritis terhadap nilai-nilai patriarkal, pendidikan akan terus berputar dalam siklus ketimpangan yang sama (Fitriani & Neviyarni, 2022).

3. Analisis Sosologis terhadap Ketimpangan Gender

Fenomena ketimpangan gender dalam pendidikan tidak bisa dipahami hanya dari satu perspektif, melainkan harus dianalisis melalui berbagai teori sosiologis. Setidaknya terdapat tiga pendekatan besar yang sering digunakan dalam menganalisis isu ini: fungsionalisme struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik.

a. Perspektif Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme melihat pendidikan sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Menurut Durkheim dan Parsons, setiap elemen masyarakat memiliki fungsi yang mendukung keteraturan sosial (Roziqin et al., 2019). Namun, dalam konteks gender, pendekatan ini sering menganggap pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang wajar dan fungsional. Misalnya, peran perempuan sebagai pengasuh dianggap penting bagi keberlangsungan keluarga, sementara laki-laki sebagai pencari nafkah dianggap vital bagi ekonomi rumah tangga. Pandangan ini, meski tampak netral, sebenarnya memperkuat sistem patriarki dengan membenarkan ketimpangan peran dalam pendidikan dan dunia kerja.

b. Perspektif Teori Konflik

Berbeda dengan fungsionalisme, teori konflik (Marx, Bourdieu) menilai pendidikan sebagai arena pertarungan ideologi dan kekuasaan. (Bourdieu, 1986) menjelaskan konsep *cultural capital* dan *habitus* untuk menunjukkan bagaimana sekolah mereproduksi ketimpangan sosial melalui nilai-nilai yang dianggap “berkelas.” Dalam konteks gender, habitus patriarki membuat norma dan perilaku laki-laki lebih dihargai di ruang publik dibanding perempuan. Akibatnya, perempuan mengalami hambatan struktural dalam mencapai posisi akademik atau kepemimpinan. Teori konflik menyoroti bahwa ketimpangan gender bukanlah kecelakaan sosial, tetapi hasil dari relasi kekuasaan yang terus dijaga oleh sistem sosial melalui lembaga pendidikan (Iqbal et al., 2023).

c. Perspektif Interaksionisme Simbolik

Pendekatan interaksionisme simbolik memberi perhatian pada interaksi sehari-hari di lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini, identitas gender tidak dianggap bawaan lahir, melainkan hasil konstruksi sosial yang diciptakan melalui simbol, bahasa, dan perilaku. Guru berperan penting dalam membentuk identitas gender siswa. Penelitian (Wani et al., 2024) menunjukkan bahwa guru secara tidak sadar sering memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan secara berbeda siswa laki-laki lebih sering diminta menjadi pemimpin kelompok, sementara siswa perempuan diarahkan pada tugas-tugas administratif atau estetis. Interaksi ini mengukuhkan stereotip bahwa kepemimpinan adalah domain laki-laki.



Ketiga pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif bahwa ketimpangan gender bersifat multidimensi: ia berlangsung di tingkat struktural (kebijakan dan ekonomi), kultural (nilai dan norma), serta interaksional (hubungan sosial sehari-hari). Oleh karena itu, pendidikan humanis yang berkeadilan gender harus mampu menjawab persoalan di ketiga tingkat tersebut. Ia tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga pada cara berpikir dan berinteraksi yang memuliakan semua manusia tanpa diskriminasi.

4. Implementasi Pendidikan Humanis Berkeadilan Gender di Indonesia

Penerapan pendidikan humanis yang berkeadilan gender di Indonesia menghadapi tantangan sosial, budaya, dan struktural yang cukup kompleks. Meskipun kebijakan pendidikan nasional seperti “Merdeka Belajar” sudah mulai menekankan kebebasan berpikir, nilai kemanusiaan, dan keberagaman (Kemdikbud, 2021), implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan humanisme sosial. Dalam banyak lembaga pendidikan, paradigma patriarki masih menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan belajar dan berkembang secara setara.

Pendidikan humanis dalam konteks Indonesia perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai martabat manusia tanpa membedakan gender. Dalam sistem sosial yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal, pendidikan humanis menjadi media penting untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan. Freire (1985) menekankan bahwa pendidikan harus bersifat *dialogis* membuka ruang partisipasi dan refleksi bersama antara guru dan siswa. Model ini memungkinkan peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengemukakan pengalaman dan pandangan mereka tentang isu sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Salah satu wujud implementasi pendidikan humanis berkeadilan gender adalah dengan menciptakan pembelajaran yang partisipatif dan reflektif. Guru berperan sebagai fasilitator yang menumbuhkan kesadaran kritis siswa terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Dalam praktiknya, guru dapat menggunakan pendekatan *student-centered learning* yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Pendekatan ini memberikan ruang kepada perempuan untuk berpendapat, berdiskusi, dan mengambil keputusan dalam kegiatan belajar. Penelitian oleh (Munawarah, 2019) menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan kesadaran sosial yang lebih kuat.

Selain di ruang kelas, pendidikan humanis juga dapat diimplementasikan melalui kebijakan kelembagaan yang sensitif gender. Sekolah dan perguruan tinggi dapat mengadopsi kebijakan anti-diskriminasi dan perlindungan bagi siswa serta tenaga pendidik perempuan. Misalnya, memastikan bahwa fasilitas sekolah ramah terhadap kebutuhan perempuan, menyediakan beasiswa afirmatif bagi perempuan dari daerah tertinggal, serta meningkatkan representasi perempuan dalam jabatan kepemimpinan akademik. (Solihin et

al., 2022) menemukan bahwa lembaga pendidikan yang menerapkan prinsip kesetaraan gender secara kelembagaan memiliki tingkat partisipasi dan motivasi belajar yang lebih tinggi di kalangan siswi.

Kebijakan kurikulum juga menjadi aspek penting dalam implementasi pendidikan humanis. Kurikulum yang berkeadilan gender tidak hanya menambahkan tema kesetaraan secara simbolik, tetapi juga mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh mata pelajaran. Misalnya, dalam mata pelajaran sejarah, guru dapat mengangkat peran tokoh-tokoh perempuan seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dien sebagai bagian dari narasi perjuangan bangsa. Dalam pendidikan sains, guru dapat mengenalkan ilmuwan perempuan dunia seperti Marie Curie atau B.J. Habibie bersama tokoh laki-laki, untuk menanamkan pesan bahwa kemampuan berpikir ilmiah tidak ditentukan oleh gender.

Implementasi pendidikan humanis juga harus melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai mitra pendidikan. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama yang membentuk pemahaman anak tentang gender. Ketika keluarga masih mengajarkan bahwa anak perempuan harus “lebih lembut dan penurut”, pendidikan formal akan kesulitan menanamkan nilai kesetaraan. Karena itu, sekolah perlu menjalin kerjasama dengan orang tua melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, atau dialog tentang pentingnya pendidikan kesetaraan.

Pendidikan humanis yang berkeadilan gender tidak hanya bertujuan mengubah perilaku, tetapi juga membangun budaya baru yang menolak dominasi satu gender atas yang lain. Ketika perempuan diberi ruang untuk belajar dan berperan aktif, masyarakat akan mengalami transformasi sosial yang signifikan. Seperti ditegaskan oleh (Fitriani & Neviyarni, 2022), pendidikan berkeadilan gender akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki empati sosial dan kesadaran kemanusiaan yang tinggi.

5. Strategi Membangun Pendidikan Humanis Tanpa Merendahkan Derajat Perempuan

Upaya membangun pendidikan humanis tanpa merendahkan derajat perempuan harus dimulai dengan perubahan paradigma yang mendasar, yaitu: dari pendidikan yang berorientasi pada kekuasaan menuju pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan. Strategi ini tidak hanya melibatkan perubahan kebijakan, tetapi juga pembenahan budaya pendidikan dari tingkat mikro hingga makro.

Pertama, perlu dilakukan reformasi kurikulum nasional agar lebih inklusif dan sensitif terhadap isu kesetaraan gender. Kurikulum harus dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti empati, solidaritas, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini dapat diintegrasikan melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang mendorong siswa untuk mengkaji isu-isu sosial, termasuk ketimpangan gender, di lingkungannya sendiri. (Roziqin et al., 2019) menegaskan bahwa pendidikan berbasis

kesetaraan gender harus menjadi nilai inti dalam kurikulum, bukan sekadar wacana tambahan.

Kedua, strategi penting adalah peningkatan kapasitas guru sebagai agen perubahan sosial. Guru harus dibekali dengan wawasan gender dan pendekatan humanistik agar mampu menciptakan suasana kelas yang inklusif dan menghargai perbedaan. Program pelatihan guru dapat mencakup pelatihan pedagogi kritis, refleksi nilai humanisme, serta kesadaran terhadap bias yang tidak disadari (*unconscious bias*) dalam interaksi pembelajaran. (Wani et al., 2024) menyebutkan bahwa pelatihan guru yang berorientasi pada kesetaraan gender berdampak positif terhadap keterlibatan aktif siswa perempuan dalam pembelajaran.

Ketiga, pendidikan humanis berkeadilan gender memerlukan kebijakan kelembagaan yang berpihak pada perempuan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyediakan program afirmatif untuk meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan akademik, penelitian, dan pengambilan keputusan. Data BPS (2022) menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam posisi kepala sekolah dan dosen senior masih di bawah 30 persen. Padahal, kehadiran perempuan dalam posisi strategis dapat menjadi role model yang kuat bagi siswa dan mahasiswa perempuan untuk berani berkompetisi secara setara.

Keempat, penting pula membangun budaya sekolah yang partisipatif dan bebas kekerasan. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi seluruh peserta didik untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut, malu, atau diskriminasi. Pendidikan humanis menuntut interaksi yang setara antara guru dan siswa, antara siswa laki-laki dan perempuan. Ketika komunikasi dalam kelas bersifat dialogis dan menghormati pendapat semua pihak, kesadaran akan nilai kemanusiaan akan tumbuh secara alami (Freire, 1985).

Kelima, strategi yang tak kalah penting adalah pendekatan berbasis komunitas dan kolaboratif. Pendidikan humanis tidak dapat berhasil tanpa dukungan masyarakat luas. Program pendidikan berbasis masyarakat seperti pelatihan kesadaran gender, forum diskusi komunitas, atau kegiatan sosial lintas gender dapat memperluas dampak nilai-nilai humanistik di luar sekolah. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik mempraktikkan nilai empati, gotong royong, dan solidaritas sosial yang menjadi inti pendidikan humanis (Amalia, 2017).

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, pendidikan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi sistem yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia secara utuh. Pendidikan yang adil gender akan menghasilkan generasi yang berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan memiliki komitmen terhadap kemanusiaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Freire (1985), pendidikan yang membebaskan tidak berhenti pada transfer pengetahuan, melainkan pada penciptaan kesadaran untuk mengubah struktur sosial menuju keadilan dan kesetaraan.

KESIMPULAN



Perempuan dalam struktur sosial patriarkal kerap ditempatkan sebagai pihak yang terpinggirkan dan memiliki ruang terbatas untuk mengembangkan potensi intelektualnya. Namun, melalui pendekatan pendidikan humanis yang menekankan nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat manusia, perempuan dapat memperoleh ruang belajar yang lebih adil dan inklusif. Integrasi antara perspektif humanisme dan sosiologi membuka peluang bagi sistem pendidikan untuk tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembebasan dari belenggu ketimpangan gender. Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan dapat menjadi upaya strategis dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan setara bagi laki-laki maupun perempuan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa humanisme dalam pendidikan bukan hanya konsep ideal, melainkan langkah konkret dalam menumbuhkan kesadaran sosial dan menata ulang relasi gender agar lebih seimbang di ranah pendidikan dan kehidupan sosial.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar para pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas dapat menanamkan nilai-nilai humanisme dalam proses pendidikan. Pendidikan seharusnya menjadi ruang pembebasan yang mendorong kesetaraan gender, bukan memperkuat dominasi salah satu pihak. Upaya ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang lebih inklusif, pelatihan guru berbasis perspektif gender, serta pembiasaan nilai empati dan keadilan di lingkungan belajar. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian ini dengan pendekatan empiris atau studi lapangan yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana implementasi pendidikan humanis berperspektif gender diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji dinamika sosial-budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Islam At Taswassuth*, Vol 2(2), 324 – 344.
- Bourdieu, P. (1986). Bourdieu, Pierre. 1986. " The Forms of Capital. " Pp. 241-258 in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education , edited by J. G. Richardson. New York: Greenwood Press. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, 241–258.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Indeks Ketimpangan Gender Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Gender dan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.



- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Edisi Klasik Perdikan)*.
- Fitriani, E., & Neviyarni, N. (2022). Kesetaraan Gender dan Pendidikan Humanis. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 51–56. <https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.27>
- Freire, P. (1985). *Pendidikan kaum tertindas* (terj. Tim Redaksi). Jakarta: LP3ES. <https://www.scribd.com/document/513468022/Pendidikan-Kaum-Tertindas-Freire>
- Iqbal, M. F., Harianto, S., & Handoyo, P. (2023). Transformasi Peran Perempuan Desa dalam Belenggu Budaya Patriarki. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(1), 95–108. <https://doi.org/10.36451/jisip.v20i1.13>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud). (2021). *Kurikulum Merdeka Belajar dan Nilai Humanistik dalam Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbud.
- Komnas Perempuan. (2024). Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Munawarah, M. (2019). Penguatan Gender Dalam Pembelajaran Humanis. *An-Nisa*, 11(2), 467–474. <https://doi.org/10.30863/annisa.v11i2.331>
- Nur, R. J., Komariah, S., & Wilodati, W. (2024). Realizing Gender Equity Through Education. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(1), 77–90. <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i1.543>
- Roziqin, A., Suwitri, S., Apriyanto, A. A., & Sihidi, I. T. (2019). Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Tengah Education Based on Gender Equality in Central Java Province Ali Roziqin. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(2), 202–210.
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Solihin, O., Sovianti, R., Hariyati, F., & Unasian Sari, I. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender di Sekolah Agama Islam Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Buniwangi Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 2(2), 75–80. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.42>
- UNESCO. (2023). *Gender Equality in Education: Global Monitoring Report*. Paris: UNESCO Publishing.
- Wani, T., Fitria Nastiti, D., Wulan Rahmadani, I., & Erni, S. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Pembelajaran di Lingkungan Sekolah. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 43–54. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPIPS/article/view/80172>

